

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Gambaran Umum Desa Winong

Pemerintahan Desa Winong adalah organisasi yang bertugas mengelola dan memantau kepentingan warga di wilayah itu, selaras dengan tradisi dan norma-norma lokal yang mendapat pengakuan dari sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai pusat administrasi, kantor desa memiliki tanggung jawab untuk membantu penduduk sekitar dalam menangani berbagai masalah yang muncul. Desa Winong terletak di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Desa Winong bisa dicapai melalui jalan utama yang menghubungkan Kebumen dan Purworejo, yang berada di jalan raya Mirit sekitar 4,5 kilometer di sebelah selatan pertigaan Prembun.

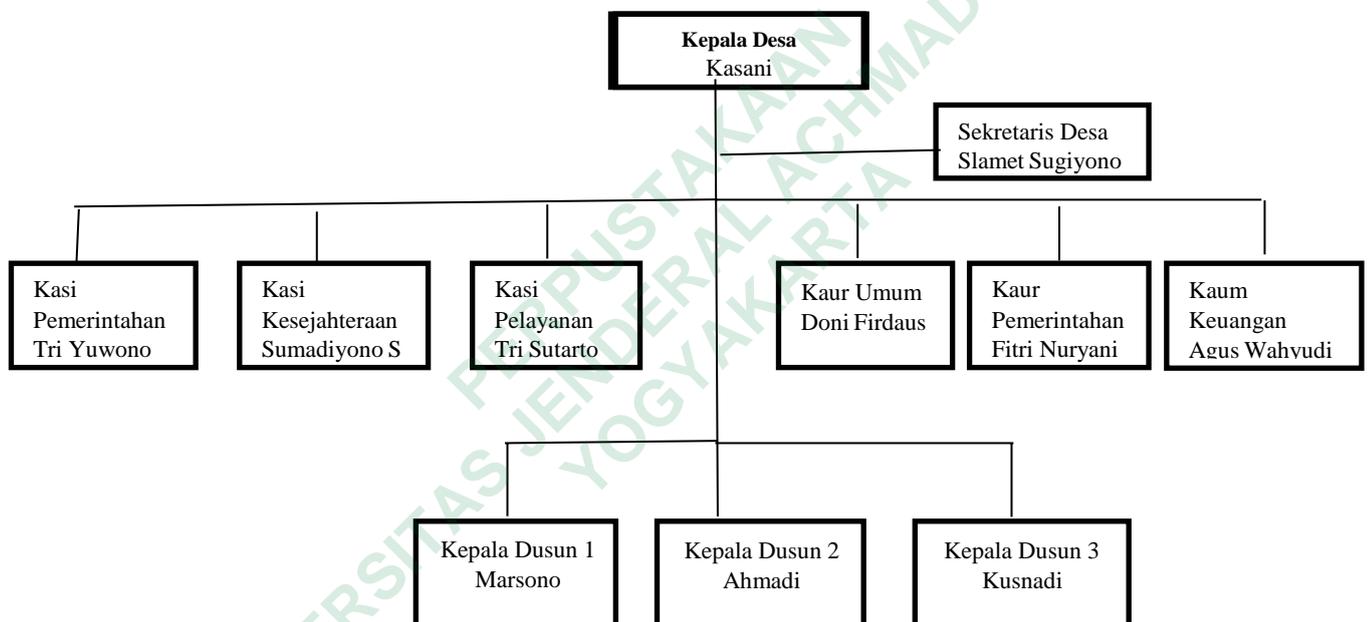
Koordinat astronomis Desa Winong adalah $7^{\circ}44'53''\text{SS}$ $109^{\circ}46'55''\text{E}$ yang memiliki luas wilayah senilai 179.010 km^2 . Secara geografis, Desa Winong terletak di sekitar beberapa desa lainnya. Desa Winong juga memiliki batas wilayah yang terdiri dari:

1. Sebelah Utara : Desa Sarwogadung
2. Sebelah Timur : Desa Abean
3. Sebelah Selatan : Desa Pekutan
4. Sebelah Barat : Desa Sidorejo (Ambal)

Dusun Dalem Sari, Gayamsari, Kauman, Winong Kulon, dan Winong Wetan adalah sejumlah dusun yang termuat di dalam desa

Winong dengan 6 RT dan 3 RW. Desa Winong memiliki 1.761 penduduk dengan 892 laki laki dan 869 perempuan. Mayoritas orang di Desa Winong beragama Islam, tetapi ada sejumlah orang yang memeluk agama Kristen. Sebagian besar masyarakat desa Winong bergantung pada sektor pertanian, pedagang, PNS dan guru sebab potensi desa atau sumber daya alamnya terletak pada sektor pertanian.

4.1.2 Struktur Organisasi



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Desa Winong Kec. Mirit Kab. Kebumen

Sumber: Pemerintahan Desa Winong (2023)

4.1.3 Penyajian Data Responden

Warga Desa Winong yang pernah berpartisipasi dalam musyawarah desa merupakan responden yang memenuhi syarat pengumpulan data dalam studi ini. Responden menerima kuesioner dengan cara diberikan secara langsung untuk diisi, meskipun beberapa responden memakai

Google Form untuk pengisian kuesioner. Penelitian ini melibatkan sejumlah 45 responden. Klasifikasi responden, yakni:

Tabel 4.1 Klasifikasi Responden Berlandaskan Jabatan

Nama	Jumlah
Perangkat Desa	10
RW	3
RT	6
BPD	3
Kader Perempuan	6
Karang Taruna/Pemuda	17
Jumlah	45

Sumber: Data Diolah (2023)

Berlandaskan data pada tabel itu, ada 10 responden yang merupakan perangkat desa, 6 responden adalah kepala rukun tetangga, 3 responden merupakan kepala rukun warga, 3 responden berasal dari badan permusyawaratan desa, 6 responden adalah kader perempuan, dan 17 responden adalah anggota karang taruna atau pemuda desa. Berlandaskan hasil penelitian, responden dibagi berlandaskan kategori gender:

Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berlandaskan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	32
Perempuan	13
Jumlah	45

Sumber: Data Diolah (2023)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa ada 32 informas laki laki dan informan perempuan sejumlah 13 orang.

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji Validitas

Sebelum kuesioner didistribusikan pada objek penelitian atau responden uji validitas dilakukan untuk memastikan keakuratannya. Sebuah instrumen penelitian dianggap valid jika pertanyaan kuesioner memperlihatkan hasil tanpa adanya kesalahan signifikan. Ada dua syarat untuk uji validitas, alat pengukur dikatakan valid saat nilai r_{hitung} melebihi r_{tabel} , dan alat pengukur dikatakan tidak valid saat nilai r_{hitung} di bawah r_{tabel} . Dengan jumlah responden 45 dalam studi ini, derajat kebebasan adalah $45-2 = 43$, dan dengan peluang kesalahan 5% nilai r tabel adalah 0,301. Hasil pengujian bisa diperhatikan dalam tabel dibawah:

Tabel 4.3 Uji Validitas

Variabel	Item	r tabel	r hitung	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	X1.1	0,301	0,665	Valid
	X1.2	0,301	0,779	Valid
	X1.3	0,301	0,722	Valid
	X1.4	0,301	0,830	Valid
	X1.5	0,301	0,761	Valid
Transparansi (X2)	X2.1	0,301	0,628	Valid
	X2.2	0,301	0,828	Valid
	X2.3	0,301	0,716	Valid
	X2.4	0,301	0,734	Valid
	X2.5	0,301	0,645	Valid
	X2.6	0,301	0,685	Valid
Partisipasi Masyarakat (X3)	X3.1	0,301	0,436	Valid
	X3.2	0,301	0,722	Valid
	X3.3	0,301	0,764	Valid
	X3.4	0,301	0,668	Valid
	X3.5	0,301	0,675	Valid

Efektivitas	Y1.1	0,301	0,653	Valid
Pengelolaan Dana	Y1.2	0,301	0,627	Valid
Desa (Y1)	Y1.3	0,301	0,661	Valid
	Y1.4	0,301	0,702	Valid
	Y1.5	0,301	0,646	Valid
	Y1.6	0,301	0,744	Valid
	Y1.7	0,301	0,750	Valid

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Nilai r hitung pada alat ukur atau seluruh item pertanyaan penelitian ini melebihi nilai r tabel, maka alat ukur dianggap sah dan cocok untuk pengumpulan data.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Pengujian dipakai untuk menentukan seberapa andal atau bisa diandalkan suatu alat ukur. Instrumen dianggap bisa dipercaya atau reliabel saat jawaban responden pada suatu pernyataan yang diajukan konsisten. Alat penelitian diakui andal saat skor Cronbach's nya melebihi 0,60 dan tidak andal bila skornya di bawah 0,60. Berikut hasil pengujian masing-masing instrumen:

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Standar Reabilitas	Cronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas	0,60	0,808	Reliabel
Transparansi	0,60	0,791	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,60	0,666	Reliabel
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	0,60	0,810	Reliabel

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Tabel itu menyajikan bahwa keandalan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat beserta efektivitas pengelolaan dana desa bisa diandalkan, sebab nilai Cronbach's alpha untuk tiap-tiap variabelnya melebihi 0,60. Hasil pengujian memperlihatkan jika instrumen yang

dipakai dalam studi ini bisa dipercaya.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Pendekatan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov bisa dipakai dengan maksud agar normal tidaknya distribusi suatu variabel bisa dievaluasi. Distribusi dianggap normal semisal nilai signifikansi melebihi 0,05, di lain sisi bila nilainya kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak mengikuti distribusi normal.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		45 ^c
Exponential parameter. ^{a,b}	Mean	.8557952
Most Extreme Differences	Absolute	.246
	Positive	.132
	Negative	-.246
Kolmogorov-Smirnov Z		1.324
Asymp. Sig. (2-tailed)		.060

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Seperti yang diperlihatkan dalam tabel, nilai sig senilai 0,060 > dari 0,05 memperlihatkan bahwa terlihat adanya distribusi normal pada semua variabel, sehingga pengujian berikutnya sudah layak untuk dijalankan.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dijalankan dengan maksud agar kuat lemahnya keterkaitan yang terjalin antara variabel bebas pada suatu model regresi bisa dilihat dan dievaluasi. Multikolinearitas terjadi ketika

hubungan antar variabel independen sangat kuat sehingga sulit untuk membedakan kontribusi masing-masing variabel pada variabel dependen. Berikut adalah langkah-langkah untuk menentukan apakah terjadi multikolinearitas:

1. Tidak terlihat adanya peristiwa multikolinearitas saat nilai VIF di bawah 10.00 atau nilai toleransi melebihi 0,10.00.
2. Terlihat adanya peristiwa multikolinearitas saat nilai VIF melebihi 10.00 atau nilai toleransi di bawah 0,10.00.

Hasil uji multikonolinearitas dalam studi ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikonolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Akuntabilitas	.464	2.157	Tidak terlihat adanya peristiwa multikonolinearitas
Transparansi	.491	2.038	Tidak terlihat adanya peristiwa multikonolinearitas
Partisipasi masyarakat	.525	1.905	Tidak terlihat adanya peristiwa multikonolinearitas

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Tabel di atas memperlihatkan tidak terjadi multikolinearitas pada variabel akuntabilitas, dengan nilai toleransi senilai 0,464 kemudian nilai VIF senilai 2,157. Pada variabel transparansi nilai VIF 2,038 dan nilai toleransi senilai 0,491 maknanya tidak terjadi multikolinearitas. Variabel partisipasi masyarakat senilai VIF 1.905 dan nilai toleransi senilai 0.525 memperlihatkan bahwa tidak terlihat adanya peristiwa multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heterokedastisitas

Tes heteroskedastisitas dilaksanakan untuk menentukan apa ada perbedaan varian yang tidak konsisten dari residual antara satu peninjauan dengan peninjauan lainnya dalam model regresi. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, bisa ditarik simpulan bahwa tidak muncul heteroskedastisitas di model itu.

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Batas
Akuntabilitas	.078	0,05
Transparansi	.224	0,05
Partisipasi Masyarakat	.326	0,05

Sumber: Data diolah memakai SPSS (2023)

Diperhatikan dari tabel, model regresi tidak memperlihatkan heterogenitas sebab variabel akuntabilitas memiliki nilai signifikansi 0,078, variabel transparansi 0,224 dan variabel partisipasi masyarakat senilai 0,326.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut ini persamaan regresi linier berganda:

Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std Error
Constanst	1.753	3.106
Akuntabilitas	.359	.144
Transparansi	.297	.133
Partisipasi Masyarakat	.543	.200

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Berlandaskan tabel di atas maka didapat persamaan, yakni:

$$Y = 1,753 + 0,359 + 0,297 + 0,543 + e$$

Keterangan:

- Y : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa
 a : Bilangan konstanta
 b : Koefisien regresi
 X_1 : Akuntabilitas
 X_2 : Transparansi
 X_3 : Partisipasi Masyarakat
 e : Standar eror

1. Nilai konstanta = 1,753

Dengan nilai konstanta senilai 1,753 mengindikasikan bahwa efektifnya pengelolaan dana desa saat akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat diterapkan.

2. Akuntabilitas = 0,359

Efikasi pengelolaan dana desa akan naik senilai 0,359 jika terjadi kenaikan akuntabilitas senilai 1% dan turun senilai 0,359 jika terjadi penurunan akuntabilitas senilai 1% selaras dengan koefisien variabel akuntabilitas yaitu 0,359.

3. Transparansi = 0,297

Efikasi pengelolaan dana desa akan naik senilai 0,297 jika terjadi kenaikan transparansi senilai 1% dan turun senilai 0,297 jika terjadi penurunan transparansi senilai 1% selaras dengan koefisien variabel transparansi senilai 0,297.

4. Partisipasi Masyarakat = 0,543

Efikasi pengelolaan dana desa meningkat senilai 1% dan mengalami penurunan senilai 1% jika terjadi kenaikan dan penurunan partisipasi masyarakat senilai 0,543.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Parsial (Uji-t)

Tes dijalankan dengan maksud agar mengetahui apa efek yang diterima oleh variabel dependen dari tiap-tiap variabel independen. Dalam studi ini, membandingkan antara t_{tabel} dan t_{hitung} dipakai untuk menjalankan uji hipotesis. Nilai t pada tabel ditentukan dengan derajat signifikansi 5% dan $(df) = n-k-1$, berikut kriteria yang dipakai:

1. Hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima, saat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (variabel independen memiliki pengaruh pada variabel dependen).
2. Hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak, saat nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (variabel independen tidak memiliki pengaruh pada variabel terikat).

Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
		B	Std. Error	Beta	
	Akuntabilitas	.359	0.144	0.325	2.492
	Transparansi	.297	0.133	0.284	2.240
	Partisipasi masyarakat	.543	0.200	0.333	2.714

a. Dependent Variable: Efektivitas pengelolaan dana

Sumber: Data diolah memakai SPSS (2023)

Berlandaskan pada nilai t_{tabel} sebesar 2,020 dan hasil uji pada tabel diatas, mengindikasikan bahwa:

1. Variabel akuntabilitas mendapatkan nilai t_{hitung} senilai 2,492 dan t_{tabel} senilai 2,020 artinya t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,492 > 2,020$) sehingga dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima dan efektivitas

pengelolaan dana desa di Desa Winong, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen mendapat pengaruh dari variabel akuntabilitas.

2. Sementara itu, pada variabel transparansi nilai t_{hitung} sebesar 2,240 dan t_{tabel} sebesar 2,020 artinya t hitung lebih besar dari t tabel ($2,240 > 2,020$) sehingga dikatakan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_2 sebabnya pengelolaan dana desa yang efektif di Desa Winong, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen mendapat pengaruh dari transparansi.
3. Di lain sisi, pada variabel partisipasi masyarakat nilai t_{hitung} sebesar 2,714 dan t_{tabel} sebesar 2,020 artinya t hitung lebih besar dari t tabel ($2,714 > 2,020$) oleh karenanya dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima dan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Winong, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen juga mendapat pengaruh dari partisipasi masyarakat.

4.5.2 Uji Simultan (Uji-f)

Pengujian dijalankan dengan maksud agar diketahui dampak bersamaan variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa. Secara ketentuan efektivitas pengelolaan dana desa mendapat pengaruh dari variabel independen saat nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ dengan derajat signifikansi 5% dan $(df1) = k-1$ $(df2) = n-k-1$. Berikut adalah hasil pengujian simultan:

Tabel 4.10 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F
1	Regression	181.862	3	60.621	28.589
	Residual	86.938	41	2.120	
	Total	268.800	44		
a. Dependent Variable: Efektivitas pengelolaan dana					
b. Predictors: (Constant), Partisipasi masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas					

Sumber: Data diolah memakai SPSS (2023)

Berlandaskan tabel, hasil pengujian memperlihatkan bahwa nilai f_{hitung} adalah 28,589 dan nilai f_{tabel} 2,839 ($f_{hitung} > f_{tabel}$) sehingga H_0 ditolak dan H_4 diterima. Dari hasil ini bisa ditarik simpulan bahwa secara simultan variabel dependen, yakni efektivitas pengelolaan dana desa mendapat pengaruh dari variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

4.6 Uji Koefisiensi Determinan (R^2)

Uji koefisien determinasi dijalankan dengan maksud agar besar kecilnya pengaruh yang diterima variabel dependen dari variabel independen bisa dievaluasi dan diketahui. Berikut adalah hasil dari tes koefisien determinasi:

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.823 ^a	.677	.653	1.45617
a. Predictors: (Constant), Partisipasi masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas				

Sumber: Data diolah memakai SPSS (2023)

Data yang ada pada tabel itu memperlihatkan bahwa koefisien determinasi memiliki nilai senilai 0,653 atau setara dengan 65,3%. Maknanya, efektivitas pengelolaan dana desa mendapat pengaruh dari variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara bersamaan senilai 65,3%. Sisanya yaitu 34,7% mendapat pengaruh dari faktor lain yang tidak dipaparkan dalam studi ini.

4.7 Pembahasan

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Winong, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hasil dari pengujian memakai SPSS, yakni:

4.7.1 Pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

Hasil uji yang bisa diambil adalah pengelolaan dana desa yang efektif mendapat dampak dari akuntabilitas. Hasil uji parsial mengindikasikan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,492 dan t_{tabel} sebesar 2,020 maknanya t hitung lebih besar dari t tabel ($2,492 > 2,020$), dengan demikian H_0 ditolak dan diterimanya H_1 yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai lembaga administrasi desa memiliki fungsi/tugas yang harus dilakukan dengan baik mengacu pada peraturan yang berlaku. Keikutsertaan perangkat desa dalam proses penyusunan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban sangat diperlukan dalam

pengelolaan dana desa. Suatu kegiatan akan efektif apabila memiliki perencanaan, karena tanpa adanya rencana maka tujuan tidak mungkin tercapai. Akuntabilitas program hendaknya dibuat untuk menyokong pendekatan dalam perwujudan visi, misi dan target organisasi supaya mengilangkan inefisiensi dalam tindakan pemerintahan. Kebijakan ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan untuk mendekati tujuan yang terarah.

Dalam akuntabilitas, pemerintahan desa bertanggungjawab atas segala aktivitas pengelolaan sumber daya, termasuk dana desa untuk menggambarkan kinerja secara finansial pemerintah desa secara horizontal maupun vertikal yaitu kepada masyarakat desa maupun pemerintah daerah dan pusat. Selain pertanggungjawaban secara finansial, pemerintah desa juga harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah ditetapkan serta program-program yang dibuat sampai pada pelaksanaannya.

Hal ini dapat dikaitkan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa pemerintah bertindak sebagai agen berkewajiban untuk memberikan tanggung jawab khususnya untuk memberikan laporan dan mengungkapkan kepada masyarakat sebagai prinsipal atas segala kegiatan yang dilakukan. Adanya pengawasan dari tim pelaksana pada pengelolaan dana desa akan mendorong pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan aspek kepatuhan hukum dan kejujuran sehingga dapat menghindari penyalahgunaan jabatan, kebocoran dana, serta dapat

memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat desa sehingga dapat dirasakan manfaatnya.

Sebagai hasil penelitian mengartikan bahwa akuntabilitas memiliki kontribusi dalam pengelolaan dana desa. Ini didorong dengan studi yang dijalankan oleh Maina, dkk. (2022) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa se- Kecamatan Sambu Boyolali” yang menyimpulkan jika akuntabilitas mempengaruhi pengelolaan dana desa.

4.7.2 Pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

Hasil uji pada variabel transparansi memperlihatkan bahwa transparansi memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Winong, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Nilai t_{hitung} sebesar 2,240 dan t_{tabel} sebesar 2,020 artinya t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,240 > 2,020$) sehingga dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_2 yang menerangkan transparansi mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dapat diterima. Sehubungan dengan hal itu, bisa ditarik simpulan bahwa transparansi memiliki kontribusi yang vital untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang efektif.

Menurut deskripsi transparansi, artinya pemerintah membuka diri pada masyarakat supaya masyarakat bisa mengetahui bagaimana dana desa dipakai dan apa yang dilakukan pemerintah desa. Transparansi harus *informative* artinya memberikan aliran informasi, kabar, fakta dan data

kepada para pemegang kepentingan secara relevan dan akurat. Transparansi dalam konteks pengelolaan dana desa berarti pemerintah desa diharuskan mengungkapkan kepada publik atas kinerja finansial maupun aktifitasnya. Keterbukaan informasi memuat penyampaian mengenai penyelenggaraan pemerintah yang dapat dengan mudah diakses publik dan dipahami masyarakat desa, baik dengan cara memasang papan informasi atau baliho di tempat yang mudah dijangkau maupun dengan memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial. Fenomena ini berkaitan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai *agent* harus melaporkan kepada masyarakat selaku *principal*.

Musyawarah desa dilakukan secara rutin dalam perencanaan pengelolaan dana desa akan mewadahi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya secara langsung. Hal ini akan membantu pemerintah desa memahami kebutuhan prioritas yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Laporan diberikan secara berkala mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat desa agar masyarakat dapat menerima informasi yang aktual. Penerapan transparansi dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan mendukung program-program yang ada, selain itu transparansi akan memudahkan kita dalam mendeteksi potensi adanya penyalahgunaan dana karena mendapat pengawasan dari berbagai pihak. Dengan dilakukannya transparansi ketika mengelola dana desa,

alhasil dana desa dapat dialokasikan lebih tepat dan sesuai sasaran kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini, artinya transparansi memiliki peran penting pada pengelolaan dana desa. Temuan ini selaras dengan studi yang dijalankan oleh Masruroh (2024) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Karimun” yang mengemukakan bahwa transparansi memiliki pengaruh atas pengelolaan dana desa.

4.7.3 Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

Pada Desa Winong, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, ada pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Perolehan uji-t menampilkan nilai t_{hitung} sebesar 2,714 dan t_{tabel} sebesar 2,020 artinya t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,714 > 2,020$) itulah sebabnya dikatakan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_3 yang menerangkan partisipasi masyarakat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat bermakna melibatkan masyarakat pada proses penyelenggaraan pemerintah. Masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam bentuk sumbangan ide, pikiran maupun tenaga.

Partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah dalam

menentukan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat sehingga dana desa digunakan secara efektif dan efisien. Musyawarah desa dilakukan agar masyarakat dalam berpartisipasi langsung dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Hal ini menunjukkan peran masyarakat sebagai *principal* dan pemerintahan desa sebagai *agent*. Partisipasi masyarakat tidak terhenti pada tahap perencanaan, namun masyarakat juga perlu untuk melakukan pengawasan dan monitoring pada proses pengelolaan dana desa agar dapat berjalan sesuai tujuan sehingga masyarakat akan terlibat dalam menerima manfaat hasil dari dana desa. Oleh sebab itu, pengelolaan dana desa akan menjadi lebih efisien saat partisipasi masyarakat diterapkan.

Di lain sisi, studi yang dijalankan oleh Andriani (2019) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)” menunjukkan bahwa partisipasi berdampak pada tata kelola dana desa.

4.7.4 Pengaruh akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

Hasil uji simultan pada variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat adalah nilai f_{hitung} 28,589 dan nilai f_{tabel} 2,839 ($f_{hitung} > f_{tabel}$) sehingga menolak H_0 dan menerima H_4 yang menyatakan jika efektivitas pengelolaan dana desa memperoleh pengaruh dari

akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat secara bersamaan. Hasil ini memperlihatkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa mendapat impresi dari tiga variabel itu secara berbarengan. Berlandaskan hasil uji koefisien determinasi yaitu sebesar 0,653 atau setara dengan 65,3% berarti efektivitas pengelolaan dana desa mendapat pengaruh dari variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara bersamaan senilai 65,3%.

Akuntabilitas berarti pemerintah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang telah diambil. Akuntabilitas akan menjadikan pemerintahan desa terdorong untuk bekerja dengan jujur dan bertanggungjawab karena harus bertanggungjawab atas penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pihak yang berwenang. Hal tersebut mencegah penyalahgunaan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah desa. Transparansi bagi pengelolaan dana desa memungkinkan publik dalam memperoleh informasi bagaimana dana desa dipergunakan. Masyarakat dapat memantau dan mengawasi proses pengelolaan sehingga mengurangi resiko penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, keterlibatan warga dalam pengelolaan dana desa diperlukan agar mereka dapat menyumbangkan pendapatnya secara langsung, hal ini membantu pemerintah desa pada proses pengambilan keputusan, dan mengerti prioritas penggunaan dana dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat dalam pengurusan dana desa mampu menumbuhkan penyelenggaraan dana desa akan lebih efektif, karena keputusan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat, prosesnya lebih efisien dan hasilnya serasi dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini didorong dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2023) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar)” yang menghasilkan pengelolaan dana desa dipengaruhi secara bersamaan oleh variabel akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat.